

## BAB I

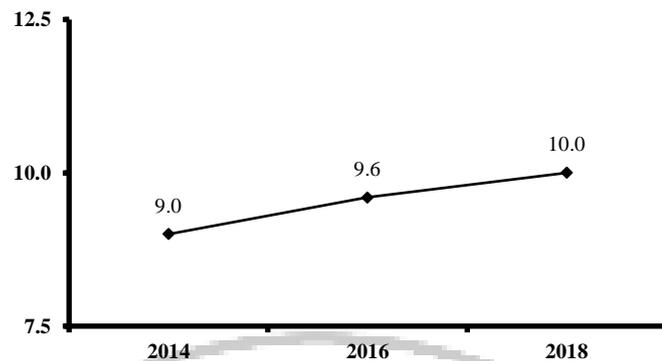
### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan *output* dari kegiatan akuntansi yang berisi semua data keuangan dan aktivitas operasional perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan baik kinerja secara keuangan maupun kinerja secara operasional yang berupa kemampuan pengelolaan sumber dayanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak *stakeholder* selama periode berjalan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berterima umum. Standar ini ditetapkan agar laporan keuangan mudah untuk dipahami dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan milik perusahaan lainnya. Sehingga diharapkan laporan keuangan dapat berfungsi secara maksimal dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak berkepentingan khususnya para investor. Informasi mengenai kinerja perusahaan dapat diperoleh investor melalui laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut, investor dapat menilai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bantu dalam membuat keputusan berinvestasi.

Banyak perusahaan bersaing untuk memenuhi tuntutan pasar dengan menunjukkan peningkatan kinerjanya melalui laporan keuangan. Keharusan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka mendapatkan kesan baik dari berbagai pihak menjadi salah satu dorongan yang memaksa manajemen perusahaan untuk melakukan manipulasi pada bagian-bagian tertentu dalam laporan keuangan milik perusahaannya. Manipulasi tersebut dilakukan secara sengaja dengan memperbesar (*overstate*) aset, penjualan, dan laba serta memperkecil (*understate*) hutang, biaya dan kerugian. Sehingga pada akhirnya akan menyajikan informasi yang salah saji, tidak handal juga tidak relevan dan merugikan banyak pihak terutama para investor yang telah menginvestasikan dananya pada perusahaan yang melakukan praktik kecurangan tersebut. Mereka telah salah dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kegagalan atas aktivitas investasinya.

Permasalahan dalam praktik-praktik kecurangan pada laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan *financial statement fraud* merupakan kategori *fraud* yang tidak bisa dianggap remeh.



Sumber : ACFE, diolah peneliti

Gambar 1.1  
PRAKTIK *FINANCIAL STATEMENT FRAUD*

Gambar 1.1 menunjukkan peningkatan praktik *financial statement fraud* dari 9,0 persen pada 2014 kemudian 9,6 persen pada 2016 dan menjadi 10 persen pada 2018. Meskipun peningkatannya tidak signifikan namun berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE (2018) menyatakan bahwa *financial statement fraud* merupakan kategori *fraud* yang paling merugikan sebesar \$800.000 dibandingkan dengan *asset misappropriation* dan *corruption* yang terjadi sebesar 89 persen dan 38 persen dengan total kerugian mencapai \$114.000 dan \$250.000.

Praktik *financial statement fraud* sendiri dapat terjadi pada berbagai sektor industri, bahkan pada sektor-sektor yang banyak diminati oleh investor. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi memiliki porsi 13,2 persen, sedangkan untuk sektor listrik, gas dan air memiliki porsi 12,8 persen dari total investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) pada tahun 2018 dengan nilai investasi mencapai Rp 70,7 triliun dan Rp 68,7 triliun (<https://finance.detik.com>). Kondisi serupa juga dialami oleh perusahaan sektor infrastruktur yang pada awal tahun 2019 sedang membukukan return positif karena mengalami peningkatan harga saham. Kondisi tersebut tentu saja menunjukkan bahwa kondisi perusahaan-perusahaan sektor infrastruktur sedang aktif dan memiliki kinerja yang baik sehingga menambah minat investor untuk berinvestasi pada sektor tersebut (<https://investasi.kontan.co.id>).

Banyaknya jumlah modal yang telah ditanamkan baik oleh investor luar maupun dalam negeri justru tidak mengurangi praktik *fraud*. Sektor transportasi diketahui mengalami peningkatan praktik *fraud* dari 68 kasus pada 2016 menjadi 83 kasus pada 2018 dengan kerugian rata-rata mencapai US\$ 141.500. Sektor utilitas dengan 102 kasus pada tahun 2016 menjadi 173 kasus pada 2018 dengan kerugian rata-rata mencapai US\$ 423.000. Begitu juga dengan sektor infrastruktur yang mengalami peningkatan praktik *fraud* dengan total kasus sebanyak 86 kasus pada 2016 menjadi 90 kasus pada 2018 dengan kerugian rata-rata mencapai US\$ 243.000 (ACFE, 2018).

Praktik *financial statement fraud* yang terjadi pada sektor transportasi di Indonesia dialami oleh PT KAI pada tahun 2005. Dugaan kecurangan laporan keuangan tersebut diungkap oleh salah satu komisaris BUMN pengelola transportasi publik. Atas dugaan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk mengaudit laporan keuangan PT KAI secara menyeluruh. Manajemen diduga melakukan kesalahan penempatan status pajak penambahan nilai (PPN) sebagai pendapatan sehingga mengakibatkan posisi keuangan PT KAI

jauh berbeda. Hal tersebut diketahui pada saat melakukan inventarisasi pengadaan. Manajemen mengakui bahwa PT KAI mengalami penurunan nilai persediaan dan perlengkapan. Dalam temuannya PT KAI mengalami kerugian sekitar Rp 600 miliar. Namun hasil audit justru mencatatkan PT KAI meraup laba Rp 6,9 miliar (<https://www.liputan6.com>).

Pada 2015 PT Inovisi Infracom Tbk mendapatkan sanksi pembekuan saham atau dihentikan sementara (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena banyaknya kesalahan dan ketidaksinkronan dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Penelaahan yang dilakukan oleh otoritas bursa terhadap laporan keuangan PT Inovisi Infracom pada kuartal III-2014 diperoleh delapan poin ketidaksinkronan atau kesalahan. Poin-poin tersebut terletak pada akun hutang lain-lain pihak terelasi dan pihak ketiga, saldo awal aset tetap, laba bersih yang tidak dapat diatribusikan, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran utang pihak berelasi, laporan segmen usaha, jumlah kewajiban serta instrumen keuangan yang tidak sinkron dengan laporan keuangan tahunan hasil audit. Kesalahan-kesalahan tersebut diduga sebagai salah satu upaya untuk melakukan praktik keurangan laporan keuangan (<https://finance.detik.com>).

Kasus serupa juga dilakukan oleh lini usaha British Telecom, perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi di Italia yang diungkap pada tahun 2017. British Telecom melakukan peningkatan atas laba perusahaan selama beberapa tahun melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan vendor.

Skandal *fraud* tersebut berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor karena anjloknya harga saham British telecom (<https://www.wartaekonomi.co.id>).

Melakukan deteksi sedini mungkin atas kemungkinan terjadinya *fraud* seperti praktik-praktik yang telah dipaparkan diatas merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya *fraud* yang berkepanjangan. Deteksi atas *fraud* dapat ditinjau dari berbagai perspektif, salah satu teori yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya *fraud* adalah teori yang dikembangkan oleh Crowe Horwarth pada tahun 2011 yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Cressey serta Wolfe dan Hermanson. Crowe (2011) menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak kecurangan karena adanya lima faktor yang mendukung yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*competence*) dan arogansi (*arrogance*) teori tersebut dinamakan dengan *Crowe's fraud pentagon theory*.

*Pressure* atau tekanan merupakan suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, dorongan tersebut salah satunya dapat disebabkan karena kebutuhan finansial (AICPA, 2002). Dalam memenuhi kebutuhannya, manajemen akan melakukan segala cara termasuk praktik *financial statement fraud* yang dengan sengaja memanipulasi akun-akun tertentu dalam laporan keuangan demi mendapatkan pendapatan seperti bonus akhir tahun yang diberikan atas kemampuannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

*Opportunity* atau kesempatan merupakan peluang yang dapat menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan *fraud*. Sistem pengendalian internal dan pengawasan dalam suatu perusahaan

sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan *fraud*. Lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya pengawasan atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu perusahaan akan memberikan banyak celah yang dapat menjadi kesempatan bagi manajemen atau para pelaku *fraud* untuk melakukan praktik *fraud* misalnya dengan memanipulasi transaksi yang merupakan bagian dari *financial statement fraud* (AICPA, 2002).

*Rationalization* atau rasionalisasi merupakan elemen penting yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* karena pelaku mencari pembenaran atas tindakan kejahatannya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh orang lain (AICPA, 2002). Pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih seperti posisi, gaji dan promosi karena telah lama mengabdikan pada perusahaan, atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar. Praktik lain yang biasa dilakukan oleh manajemen atas sikap ini seperti pembenaran atas praktik manajemen laba yang telah dilakukannya.

Elemen berikutnya dalam *crowe's fraud pentagon theory* adalah *competence* dan *arrogance*. Kecurangan akan terjadi dengan orang dan kemampuan yang tepat. *Competence* merupakan kemampuan individu untuk mengabaikan *internal control*, mengembangkan strategi penyembunyian dan mengontrol situasi sosial demi tercapainya tujuan tertentu atau untuk kepentingan pribadinya (Crowe, 2011). Kemampuan individu dalam hal ini merupakan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar dan memungkinkan untuk melakukan suatu praktik kecurangan, sehingga pelaku bisa

memanfaatkan posisinya guna memperlancar tindakannya. *Arrogance* merupakan tingkat keangkuhan atau sikap superioritas atas posisi yang dimiliki dan merasa bahwa *internal control* atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya (Crowe, 2011). Pelaku merasa atau menganggap dirinya yang paling unggul dan ingin menunjukkan kepada semua orang akan status dan posisi yang dimilikinya. Pola pikir seperti itu membuat pelaku merasa mudah untuk melakukan cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan yang sekarang dimiliki termasuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan.

Elemen-elemen dalam *Crowe's fraud pentagon theory* yang menjadi variabel independen pada penelitian ini menggunakan proksi variabel dalam pengukurannya sehingga dapat diteliti. Proksi yang digunakan antara lain *pressure* yang diproksikan dengan *financial stability*. *Opportunity* diproksikan dengan *nature of industry*. *Rationalization* diproksikan dengan *change in auditor*. *Competence* yang dalam penelitian ini menggunakan proksi *change in direction*. Serta *arrogance* yang diproksikan dengan *political connection*.

Schinasi (2004) mendefinisikan *financial stability* sebagai gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam beroperasi. Manajemen seringkali mendapatkan tekanan untuk menunjukkan bahwa kinerja perusahaannya baik yang ditunjukkan melalui pengelolaan sumber daya dengan harapan profit yang dihasilkan banyak. Banyaknya profit yang mampu dihasilkan menjadi daya tarik bagi para investor karena nantinya juga akan menghasilkan *return* yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut manajemen memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas keuangan perusahaan yang kurang baik

dengan melakukan *financial statement fraud*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Laila dan Marfuah (2015), Ketut, Nyoman dan Made (2016), Mafiana, Lindrianasari dan Yuztitya (2016), Aditya dan Ninuk (2017), Warsidi, Bambang dan Suhartinah (2018) serta Helda, Aaron dan Sylvia (2018), namun tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan Merissa dan Isti (2016) serta Langgeng (2018).

*Nature of industry* atau sifat industri merupakan keadaan ideal suatu perusahaan (Warsidi, Bambang dan Suhartinah, 2018). Kebebasan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan oleh perusahaan dalam beberapa hal memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan *financial statement fraud*. Manajemen perusahaan dapat menilai pendapatan dari piutang usaha dengan mengestimasi piutang tak tertagihnya secara subjektif. Misalnya saja dengan memanipulasi tanggal jatuh tempo maupun menghilangkan sebagian piutang usaha sehingga akan berpengaruh terhadap akun pendapatan dalam laporan keuangan perusahaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ketut, Nyoman dan Made (2016) serta Warsidi, Bambang dan Suhartinah (2018) menyatakan bahwa *nature of industry* memiliki pengaruh terhadap *financial statement fraud*. Sedangkan menurut Laila dan Marfuah (2015), Merissa dan Isti (2016), Mafiana, Lindrianasari dan Yuztitya (2016) serta Langgeng (2018) tidak.

*Change in auditor* merupakan upaya untuk meminimalisir kemungkinan *financial statement fraud* terdeteksi atau sebagai tindakan menghapus jejak kecurangan yang pernah ditemukan oleh auditor lama (Lou dan Wang, 2009). Berdasarkan hal tersebut pergantian auditor independen dalam suatu

perusahaan dianggap dapat mengindikasikan adanya kecurangan. Kemampuan yang dimiliki oleh auditor lama dalam mendeteksi kemungkinan kecurangan yang secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh manajemen dianggap lebih besar, sehingga manajemen cenderung untuk mengganti auditornya dan menganggap perlakuan yang seperti itu adalah wajar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lou dan Wang (2009), Ketut, Nyoman dan Made (2016), Aditya dan Ninuk (2017), serta Helda, Aaron dan Sylvia (2018) yang memproksikan *rationalization* dengan *change in auditor* dengan hasil berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud* tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Merissa dan Isti (2016) serta Warsidi, Bambang dan Suhartinah (2018).

*Change in direction* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi-direksi sebelumnya (Aditya dan Ninuk, 2017). Pergantian direksi dapat dilakukan dengan cara pengangkatan karyawan sebagai direksi atau melakukan perekrutan direksi baru yang dianggap lebih berkompeten. Pergantian direksi tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Direksi perusahaan dapat menjadi faktor yang menentukan apakah kecurangan dapat terjadi atau justru sebaliknya. Kecurangan dapat dengan mudah terjadi atau dilakukan oleh direksi perusahaan karena penyalahgunaan wewenang atas posisi yang diduduki dan didukung dengan kemampuan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna memperlancar tindakannya demi tercapainya tujuan tertentu. Selain itu pergantian direksi juga dianggap dapat mengurangi epektifitas dalam kinerja karena memerlukan waktu yang lebih untuk beradaptasi dengan budaya direksi baru, sehingga hal tersebut memberikan

peluang untuk melakukan *fraud*. *Change in direction* dalam penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Ninuk (2017) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud* sedangkan dalam penelitian Mafiana, Lindrianasari dan Yuztitya (2016), Warsidi, Bambang dan Suhartinah (2018) serta Helda, Aaron dan Sylvia (2018) tidak berpengaruh.

*Political connection* didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham dan manajemen yang memiliki hubungan dengan pejabat lainnya (Ngan, 2013). Hubungan politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dianggap dapat membantu kinerja perusahaan juga meningkatkan nilai perusahaan. Komisaris perusahaan baik yang merangkap sebagai komisaris maupun pernah menjadi komisaris di perusahaan lain dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk mempertahankan kinerja dan nilai perusahaan ketika perusahaannya sedang mengalami kesulitan atau kebutuhan modal. Keuntungan atas hubungan tersebut membuat mereka berfikir bahwa mereka merupakan orang penting yang dapat menunjang kelancaran bisnis perusahaan. Pola pikir yang seperti itu akan menumbuhkan sifat arogansi dalam dirinya. Tingginya tingkat arogansi dapat menjadi penyebab terjadinya *fraud*. Pelaku ingin semua orang tahu akan kemampuan serta posisi yang dimilikinya agar mereka merasa dianggap sehingga pelaku akan melakukan segala cara untuk mempertahankan apa yang sudah dimilikinya saat ini termasuk melakukan *financial statement fraud*.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih spesifik bagaimana lima elemen dalam *Crowe's fraud pentagon theory* yang menggunakan proksi dalam pengukurannya dapat mendeteksi *financial statement fraud*,

terutama dalam sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi karena adanya peningkatan praktik yang terjadi seperti fenomena yang telah dijelaskan. Penelitian ini juga dilakukan karena penelitian-penelitian terdahulu yang masih didominasi oleh *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Selain itu karena ketidak konsistenan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini melanjutkan dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan sektor dan periode penelitian yang berbeda dari peneliti-peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan topik yang sama. Sehingga judul penelitian ini adalah “**Deteksi *Financial Statement Fraud* Dengan Analisis *Fraud Pentagon Theory*”**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial stability* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi?
2. Apakah *nature of industry* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi?
3. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi?
4. Apakah *change in direction* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi?

5. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi mengenai:

1. Pengaruh *financial stability* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.
2. Pengaruh *nature of industry* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.
3. Pengaruh *change in auditor* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.
4. Pengaruh *change in direction* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.
5. Pengaruh *political connection* terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan lain dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan oleh para auditor dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mendeteksi praktik *financial statement fraud* lebih dini. Sehingga dapat mencegah terjadinya praktik ini agar tidak berkelanjutan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa akuntansi dan diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, khususnya dibidang audit. Sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, maka dalam sistematika penulisan ini diuraikan secara garis besar mengenai isi dari setiap bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang masalah mengenai alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, bagaimana perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan kecurangan laporan keuangan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai pengulasan penelitian terdahulu dengan mengidentifikasi hasil penelitian serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, memaparkan teori yang menjadi landasan bagi penulis, bagaimana kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Menjelaskan mengenai populasi serta aspek-aspek dari sampel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Melakukan analisis data dengan mendeskripsikan hasil uji data, serta melakukan penalaran dari hasil penelitian secara teoritik dan/atau empirik mengenai pengaruh antar variabel.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan yang dialami

peneliti selama melakukan penelitian, serta saran yang diberikan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

